

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL,  
PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2017)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:**

**YULY WIDYASTUTI**

**B 200 160 249**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, PENDIDIKAN  
DAN TEKNOLOGI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2017)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Yang ditulis oleh:

**YULY WIDYASTUTI**  
**B 200 160 249**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D., CA.**  
**NIDN: 0624026901**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2017)

Oleh:

**YULY WIDYASTUTI**

**B 200 160 249**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 12 Februari 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D., CA. ( )  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Fauzan, S.E., M.Si., Ak. ( )  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Nursiam, Akt., M.H. ( )  
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. Syamsudin, M.M.**  
NIDN. 017025701

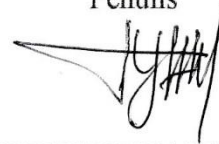
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2020

Penulis



**YULY WIDYASTUTI**  
**B200160249**

# **PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2017)**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendidikan dan Teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi pada Pemerintahan Provinsi se-Indonesia periode 2015-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 provinsi dan sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga sebanyak 97 provinsi diperoleh sebagai sampel. Data penelitian ini diperoleh dari website ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) & [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Hasil menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negative terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal, Pendidikan & teknologi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

**Kata Kunci:** Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pendidikan, Teknologi, Indeks Pembangunan Manusia

## **Abstract**

This study aims to examine and analyze the Effect of Balancing Funds, Capital Expenditures, Education and Technology on the Study of Human Development Index in Provincial Governments in Indonesia for the period 2015-2017. This research is quantitative research. The population used in this study were 102 provinces and the sample in this study was selected using the purposive sampling method so that as many as 97 provinces were obtained as samples. The research data was obtained from the website ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) & [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression with t test, f test, and the coefficient of determination test. The results show that Revenue Sharing, Special Allocation Funds have a negative effect on the Human Development Index and Capital Expenditures, Education & technology

have a positive effect on the Human Development Index while the General Allocation Fund does not affect the Human Development Index.

**Keywords:** Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure, Education, Technology, Human Development Index

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat (PBB, 1990). Pembangunan manusia telah diakui sebagai salah satu faktor utama kekayaan bangsa, karena merupakan suatu metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana dapat dilihat dari beberapa komponen diantaranya yaitu kesehatan, pengetahuan, dan pengeluaran perkapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif selain pendapatan nasional per kapita untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara.

Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah itulah yang dapat mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa intervensi serta bantuan dari pemerintah pusat. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan dari Lain-lain pendapatan yang sah serta Dana Perimbangan.

Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka menutupi kesenjangan fiskal daerah yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan dengan PAD nya. Penggunaan Dana Perimbangan secara umum sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan atau alokasinya, sehingga pemerintah daerah harus bijak dalam menggunakannya agar diperoleh hasil yang baik dalam meningkatkan pembangunan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Darmawan, 2013).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 belanja modal dapat berupa: (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja modal lainnya, dan (6) belanja modal Badan Layanan Umum (BLU).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian (Maulana dan Bowo 2013).

Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi dari penelitian Wiliantara dan Budiasih (2016), Prihastuti (2018) dan Maulana dan Bowo (2013). Adanya *research gap* dari penelitian terdahulu dan menunjukkan perbedaan hasil yang terjadi pada berbagai penelitian terdahulu menunjukkan ketidak-konsistenan hasil penelitiannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendidikan dan Teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2015-2017)”. Sehingga tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Pendidikan dan Teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## **2. METODE**

### **2.1 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel**

Populasi dan sampel penelitian ini adalah Provinsi di Indonesia tahun 2015-2017. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari peneliti.

### **2.2 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode urutan 3 tahun (2015-2017) pemerintah Provinsi se-Indonesia, yakni Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal dan Pendidikan & Teknologi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diperoleh dari website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

### **2.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya**

#### **2.3.1 Variabel Independen**

##### **a) Dana Bagi Hasil**

Pengukuran diperoleh dari Dana Bagi Hasil dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2017 dengan satuan rupiah.

##### **b) Dana Alokasi Umum**

Pengukuran diperoleh dari Dana Alokasi Umum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2017 dengan satuan rupiah.

##### **c) Dana Alokasi Khusus**

Pengukuran diperoleh dari Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2017 dengan satuan rupiah.



d) Belanja Modal

Pengukuran diperoleh dari Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2017 dengan satuan rupiah.

e) Pendidikan

Pengukuran diperoleh dari Angka Melek Huruf (AMH) dalam Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015-2017 dengan satuan persen.

f) Teknologi

Pengukuran diperoleh dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dalam Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015-2017 dengan kisaran 0-10.

### 2.3.2 Variable Dependen

Indeks Pembangunan (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan. Terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu:

- a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
- b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- c. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengukuran diperoleh dari Indeks Pembangunan Manusia dalam Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015-2017.

Terdapat 3 golongan status pembangunan manusia berdasarkan nilai IPM yaitu:

- (1)  $IPM < 50$  dikatakan rendah,
- (2)  $50 \leq IPM < 80$  dikatakan sedang/menengah, dan
- (3)  $IPM \geq 80$  dikatakan tinggi

## 2.4 Metode Analisis Data

Alat analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression*). Pengolahan data dilakukan dengan SPSS. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi linear berganda

yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat.

$$IPM = \alpha + \beta_1 DBH + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 BM + \beta_5 PEND + \beta_6 TECH + \varepsilon$$

Dimana

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

BM = Belanja Modal

PEND = Pendidikan

TECH = Teknologi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien

e = Error Term

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Pengumpulan Data

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Populasi: Pemerintah Provinsi di Indonesia (34 provinsi × 3 tahun)	102
Pemerintah Provinsi yang tidak mempublikasikan laporan Realisasi APBD	( 5 )
Pemerintah Provinsi yang tidak memiliki data IPM	( 0 )
Laporan yang tidak di audit oleh BPK	( 0 )
Jumlah sampel yang digunakan dan diolah	97

*Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2019*

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, menunjukkan bahwa dari 102 Provinsi

di Indonesia dari tahun 2015-2017 hanya terpilih 97 Provinsi yang akan digunakan sebagai sampel penelitian.

## 2.2 Pengujian Asumsi Klasik

### 2.2.1 Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

Variabel	P-value	Ketentuan	Kesimpulan
<i>Unstandardizes Residual</i>	0,675	0,05	Distribusi data Normal

*Sumber: Hasil Analisis Data 2019, Lampiran..*

Berdasarkan pada tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel *Unstandardized Residual* memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal.

### 3.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
DBH	0,572	1,749	Tidak terdapat multikolinearitas
DAU	0,772	1,295	Tidak terdapat multikolinearitas
DAK	0,641	1,561	Tidak terdapat multikolinearitas
BM	0,508	1,969	Tidak terdapat multikolinearitas
PENDIDIKAN	0,756	1,323	Tidak terdapat multikolinearitas
TEKNOLOGI	0,643	1,556	Tidak terdapat multikolinearitas

*Sumber: Hasil Analisis Data 2019, Lampiran..*

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ . Hal ini berarti bahwa model regresi terbebas dari adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen sehingga kesimpulannya adalah model yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

### 3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan
DBH	0,080	Tidak ada heteroskedastisitas
DAU	0,403	Tidak ada heteroskedastisitas
DAK	0,530	Tidak ada heteroskedastisitas
BM	0,086	Tidak ada heteroskedastisitas
PENDIDIKAN	0,143	Tidak ada heteroskedastisitas
TELNOLOGI	0,728	Tidak ada heteroskedastisitas

*Sumber: Hasil Analisis Data 2019, Lampiran..*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4 di atas, menunjukkan keseluruhan nilai signifikansi pada uji heteroskedastisitas lebih besar dari 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

### 3.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

	Durbin Watson	Keterangan
<i>P-Value</i>	1,215	Bebas Autokorelasi

*Sumber : Hasil Analisis Data 2019, Lampiran ..*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,215 angka DW berada diantara -2 sampai +2. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

### 3.3 Hasil Pengujian Hipotesis

#### 3.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Reg	T <sub>hitung</sub>	Sig.	Keterangan
Constant	33,087	2,239	0,028	
DBH	-0,453	-2,210	0,030	H <sub>1</sub> diterima
DAU	-0,030	-0,072	0,943	H <sub>2</sub> ditolak
DAK	-0,454	-2,820	0,006	H <sub>3</sub> diterima
BM	1,081	2,783	0,007	H <sub>4</sub> diterima
PENDIDIKAN	0,171	4,048	0,000	H <sub>5</sub> diterima
TEKNOLOGI	3,551	12,843	0,000	H <sub>6</sub> diterima
Uji Koefisien Determinasi	R Square = 0,073    Adjusted R <sup>2</sup> = 0,012    N = 97			
Uji F	$F_{hitung} = 48,469$		Sig = 0,000	

Sumber : Hasil Analisis Data 2019, Lampiran ..

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 33,087 - 0,453\text{DBH} - 0,030\text{DAU} - 0,454\text{DAK} + 1,081\text{BM} + 0,171\text{Pend} + 3,551 \text{ Tech} + e$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

BM = Belanja Modal

Pend = Pendidikan

Tech = Teknologi

$e$  = *Error Term*

Berdasarkan pengujian uji F pada tabel 6 yang menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 48,469 memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini berarti model regresi dalam penelitian ini telah *fit of goodness* yang menunjukkan bahwa variabel independen dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, pendidikan dan teknologi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil dari pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) terdapat pada tabel 6 yang menunjukkan nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,012 atau 1,2% yang berarti variabel indeks pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, pendidikan dan teknologi sebesar 1,2%. Sedangkan sisanya yaitu 98,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

### 3.4 PEMBAHASAN

#### 3.4.1 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 6 diketahui bahwa DBH memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,210 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,030 > 0,05$ . Dengan demikian maka  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisiensi  $\beta_1$  sebesar -0,453 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia sebesar -0,453. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya dana bagi hasil maka akan mengakibatkan menurunnya indeks pembangunan manusia.

Hal ini disebabkan karena pengelolaan dan penggunaan DBH merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Namun terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal penggunaan DBH untuk kesejahteraan masyarakat yang akan menyebabkan pengalokasian DBH kurang berdampak secara signifikan pada IPM. Peningkatan DBH seharusnya berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pemerintah daerah lebih banyak menggunakan DBH

untuk mendanai kebutuhan masyarakat melalui alokasi belanja modal demi menunjang sarana dan prasarana publik yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widarwanto, et al (2012) dan Ramadhani & Utomo (2019) memperoleh hasil bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **3.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 6 diketahui bahwa DAU memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,072 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,943 < 0,05$ . Dengan demikian maka  $H_2$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisiensi  $\beta_2$  sebesar -0,030 menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia sebesar -0,030.

Dana Alokasi Umum digunakan untuk memenuhi alokasi dasar dalam suatu pemerintahan daerah, dimana alokasi dasar merupakan alokasi anggaran untuk belanja pegawai bukan belanja modal. Seharusnya Dana Alokasi Umum lebih dialokasikan untuk belanja modal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Harahap (2011), yang menemukan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

#### **3.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 6 diketahui bahwa DAK memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,820 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,006 < 0,05$ . Dengan demikian maka  $H_3$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisiensi  $\beta_2$  sebesar -0,454 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia sebesar -0,454. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya dana

alokasi khusus maka akan mengakibatkan menurunnya indeks pembangunan manusia.

Adanya kenaikan IPM yang cukup signifikan dari peningkatan variabel DAK dapat dimaklumi karena DAK merupakan special grants yang penggunaannya sudah ditentukan sebagai dana infrastruktur, yaitu belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Serupa dengan variabel DAU, pembahasan DAK juga tidak tepat jika dilakukan secara individual karena sifatnya sebagai dana pemerataan. Ada dua pertimbangan dalam alokasi DAK, yaitu DAK untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dan DAK untuk daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal. Daerah dengan variabel DAK yang tinggi belum tentu mempunyai IPM yang tinggi demikian sebaliknya. Pembahasan secara individual harus melihat komposisi DAK serta kategori daerah bersangkutan. Secara umum daerah dengan rasio DAK/BM yang rendah terdapat pada daerah maju yang mayoritas mempunyai IPM yang tinggi pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fretes (2017), Harahap (2011), Wiliantara & Budiasih (2016) dan Riviando, et al (2019) memperoleh hasil pengujian bahwa dana aloaksi khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **3.4.4. Pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 6 diketahui bahwa BM memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,081 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$ . Dengan demikian maka  $H_4$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisiensi  $\beta_2$  sebesar -0,454 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia sebesar -0,454. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat belanja modal, maka Indeks Pembangunan Manusia juga semakin meningkat.

Keterkaitan antara belanja modal dengan Indeks Pembangunan Manusia sangat erat di mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan



kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (national character building) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mirza (2012), Sari dan Supadmi (2016), Tarumingkeng, et al (2018) memperoleh hasil pengujian bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **3.4.5 Pengaruh Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel 6 diketahui bahwa Pendidikan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,048 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian maka  $H_5$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisiensi  $\beta_2$  sebesar 0,171 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 0,171. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat pendidikan, maka Indeks Pembangunan Manusia juga semakin meningkat.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar bangsa Indonesia mempunyai SDM yang ahli, terampil, kreatif dan inovatif. Kualitas SDM sangat diperlukan jika Indonesia ingin menjadi negara yang berhasil menguasai ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrilisasi sehingga mampu menghadapi persaingan global.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Maulana & Bowo (2013) memperoleh hasil pengujian bahwa Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **3.4.6 Pengaruh Teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil uji t yang telah disajikan dalam tabel IV.8 diketahui bahwa Teknologi memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 12,843 dengan tingkat signifikansi sebesar

$0,000 < 0,05$ . Dengan demikian maka  $H_6$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Teknologi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai koefisiensi  $\beta_2$  sebesar 3,551 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel teknologi terhadap indeks pembangunan manusia sebesar 3,551. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat pendidikan, maka Indeks Pembangunan Manusia juga semakin meningkat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Monsef, et al (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara hak kekayaan intelektual, Informasi dan komunikasi Teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

### **3. PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal, Pendidikan dan Teknologi terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **4.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu Tahun pengambilan sampel hanya 3 tahun yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017, sehingga tingkat generalisasinya kurang baik. Variabel independen hanya mengungkapkan 1,2% dari pengaruhnya terhadap variabel dependen, sehingga sisanya 89,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

### 4.3 Saran

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan Periode waktu pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih di perpanjang untuk dapat mengetahui kecenderungan dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia ataupun variabel lainnya, sehingga hasil penelitian bisa memiliki kontribusi yang berbeda dalam penlitian terdahulu. Pemerintah daerah diharapkan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari capaian IPM yang diperoleh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia 2015-2017*. <http://www.bps.go.id>. diakses tanggal 29 Oktober 2019.
- Bergman, Michael and Jan-Erik Lane, (1990). *Public Policy in A Principal-Agent Framework*. *Journal of Theoretical Politics* 2(3): 339-352
- Darmawan, E. (2013). Pengaruh Dana Bagi Hasi (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya).
- Fretes, P.N. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kbpupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*. Vol.2 No.2
- Harahap, R.U. (2011). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota Propinsi Sumatra Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol.11 No.1. Maret 2011
- Maulana, Ridwan dan Prasetyo Ari Bowo (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan teknologi terhadap IPM provinsi di Indonesia. *Journal of Economics and policy*. Jejak 6 (2)
- Mirza, Denni Silistio. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*.
- Monsef, Abdolali, Majid Sameti, Mahsa Mojahednia. (2011). *The Effect of Intellectual Property Rights and Information and Comunication Technology on Human Development Index in Developing Countries During 2005-2010*. *Australian Journal of Bussines and Management Research*. Vil.1 No.9
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011.

Prihastuti, Asepma Hygi. (2018). Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Riau. *Menara Ekonomi, ISSN*. Vol.IV No.1

Ramadhani, Sri dan Cahyo Utomo. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi dan dana bantuan pemerintah terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. *Majalah Ilmiah Solusi*. Vol.17 No.1

Riviando, Adel. Henri Agustin. Halmawati (2019). “Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota Sumatera Barat”. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol.1 No.1

Sari, I.A.C.Y & Ni Luh Supadmi. (2016). Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.15 No.3.

Tarumingkeng, Winsy A. Vikie A Rumat. Tri Oldy Rotinsulu. (2018). Pengaruh belanja modal dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol.19 No.6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Widarwanto, Atanasius. Erlina. Idhar Yahya. (2014). Pengaruh DAU, DAK, PAD, DBH, BKP terhadap IPM dengan BPD sebagai moderating variabel. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol.7 No.2

Williantara, Gede Ferdi dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH pada IPM”. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 16.3.

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). di unduh tanggal 22 Oktober 2019.

[www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id). di unduh tanggal 29 Oktober 2019

